



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PELAPORAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BETTY WULANDARI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
3. NHK : **212690**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.531.003.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/23 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 223.638.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/156 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 323.388.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/360 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 381.760.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/154 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 602.217.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 340.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 17.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 250.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 217.197.208****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 2.355.200.208****III. HUTANG** **Rp. 47.780.820**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.307.419.388

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.